BAB V

ANALISIS DAN REKOMENDASI

5.1 Analisis

5.1.1 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bangka

Pelaksanaan pemungutan Pajak hotel dan restoran di kabupaten Bangka dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh seorang sekretaris dinas dan beberapa kepala bidang.

Masing – masing kepala bidang mengurus bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang, sehingga meminimalisir terjadinya kesalah pahaman antar kepala bidang dalam melaksanakan tugas nya masing – masing. Untuk pemungutan pajak hotel dan restoran, bidang yang terkait adalah bidang Pendapatan Asli Daerah, karena sesuai dengan Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah, yang mana pajak daerah juga merupakan salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran di kabupaten Bangka, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah membentuk beberapa UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) yang mana tersebar di beberapa Kecamatan yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran di wilayah kecamatannya.

Unit Pelaksana Tekhnis yang dibentuk bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, dan pengoperasionalnya dikoordinasikan oleh camat.

Dengan adanya Unit Pelaksana Tekhnis ini diharapkan pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di kabupaten Bangka dapat terlaksana secara merata dan memenuhi target di tiap kecamatan, sehingga target keseluruhan dapat tercapai secara optimal

Dengan disediakannya kantor Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kecamatan, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, karena masyarakat tidak perlu lagi jauh – jauh pergi ke kantor pusat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berada di ibukota Kabupaten.

Di beberapa kecamatan pelaksanaan roda pemerintahan tidak berlangsung sebagai mana seharusnya, misalnya di kecamatan Puding, masyarakat di kecamatan Puding sebagian besar merupakan petani Karet, setiap pagi sebelum matahari terbit masyarakatnya berbondong – bondong ke kebun karet untuk mengumpulkan getah karet yang keluar tadi malam, karena menurut pengalaman mereka, getah karet yang

dikumpulkan sebelum tengah hari merupakan getah yang baik, namun getah terbaik adalah getah yang di kumpulkan sebelum matahari terbit.

Budaya seperti ini juga berpengaruh kepada para pegawai dalam melayani masyarakat. Sebagai contoh, Pak Camat setiap keluar kantor Camat memiliki cap stempel kecamatan sendiri, yang dibawa kemana pun perginya, sehingga bila bertemu di tengah jalan atau sedang menghadiri acara di salah satu rumah masyarakat, Pak Camat selalu siap melayani masyarakatnya yang meminta pelayanan baik di saat – saat yang tidak formal.

Begitu juga dengan Pak Lurah yang seperti Pak Camat juga harus mampu mengayomi masyarakat nya dimanapun dan kapan pun masyarakatnya membutuhkan pelayanan, maka Pak Lurah harus siap melayaninya. Kebiasaan masyarakat berkebun karet juga membuat jam kantor efektif di kecamatan tersebut lain dari yang lain. Karena, jam efektif yang tersedia adalah sekitar tengah hari hingga malam hari.

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di kabupaten Bangka dilaksanakan oleh para pegawai baik itu PNS maupun honorer, setidaknya terdapat 108 Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di UPT – UPT di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka. Selain Pegawai Negeri Sipil yang ada, pegawai honorer yang bekerja di tiap kantor, baik itu kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun UPT yang tersebar di tiap kecamatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pemungutan ini, para pegawai bekerja sesuai dengan bidangnya masing – masing. Pada saat pelaksanaan magang, penulis ditempatkan di bidang Pendapatan Asli Daerah, di bidang Pendapatan Asli daerah salah satu bagian nya adalah bagian pajak dan retribusi. Setiap pegawai yang ada diruangan Bidang Pendapatan Asli Daerah tersebut telah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan keahliannya masing – masing.

Misalnya untuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel, terdiri dari 2 orang staf yang bekerja menekuni setiap hal mengenai pajak hotel, begitu juga dengan pajak restoran, dan pajak yang lainnya. Dengan adanya pembagian kewenangan seperti itu, maka setiap pegawai harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan.

Profesional merupakan salah hal yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Unit Pelaksana Tekhnis masih melaksanakan pemungutan secara *door to door*, yang mana maksudnya adalah para staf atau pegawai yang telah ditugaskan untuk melakukan pemungutan mendatangi lokasi hotel atau restoran untuk melaksanakan pemungutan.

Tidak setiap saat petugas pelaksana mampu melaksanakan tugas untuk memungut pajak berhasil, kadang kala pengelola hotel maupun

restoran sedang tidak di tempat, sehingga harus menunggu lain waktu saat pengelola hotel maupun restoran ini ada.

Dari pengamatan yang penulis dapatkan, kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan restoran nya sudah cukup baik, namun masih ada beberapa wajib pajak yang masih enggan untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Banyak alasan yang dikemukakan untuk mengelabui para petugas pelaksana pemungut pajak agar mereka diberi tenggat waktu yang lebih lama dalam membayar pajak.

Berbagai macam cara telah dilakukan oleh petugas dalam menertibkan para wajib pajak yang membandel ini, dimulai dengan memberitahukan secara langsung melalui telpon atau memberi pesan, lalu memberikan surat peringatan karena terlambat membayar, dan yang lainnya. Namun setiap tahun tetap saja ada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak tepat waktu.

Beberapa staf pernah mengatakan kepada penulis, salah satu penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak yaitu para wajib pajak sering menganggap remeh petugas pemungut, mereka menganggap petugas pemungut hanyalah staf yang dapat disuruh – suruh, kadangkala mereka menyebut kan beberapa nama pejabat yang berwenang yang menurut mereka adalah rekan kerja, sehingga dalam melaksanakan pembayaran pajak dapat merka lakukan melalui rekan kerja mereka tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang pun kurang memadai, sehingga masih banyak celah bagi para wajib pajak untuk melanggar kewajiban mereka dalam melaksanakan pembayaran pajak.

Selain petugas yang berwenang, hal lain yang berperan adalah sistem yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan pajak, kemudian sumber daya yang ada harus dimanfaatkan, salah satunya adalah sumber daya mesin yang mendukung pelaksanaan pemungutan pajak.

Sebagian besar alat – alat yang digunakan di dalam kantor dan dalam pelaksanaan pemungutan pajak merupakan alat lama yang harus diperbarui guna menunjang pelaksanaan pemungutan. Salah satu contohnya adalah kendaraan operasional dinas yang merupakan kendaraan keluaran tahun 2000an yang mana sudah banyak sakitnya sehingga perawatan yang harus diberikan untuk kendaraan tersebut cukup mengurangi pendapatan yang ada.

Lingkungan kerja yang nyaman akan memberikan energy positif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, dari hasil pengamatan penulis selama melaksanakan magang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama kurang lebih 3 minggu, lingkungan kantor sangat padat, tumpukan kertas ada dimana – mana, selain itu meja kerja para staf sangat padat dengan berkas – berkas dan data – data pajak selama 1 tahun berjalan.

Untuk arsip data – data 5 tahun kebelakang masih disimpan diruangan dengan menggunakan lemari besi sehingga memudahkan pegawai untuk mendapat kan informasi bila sedang membutuhkan data 5 tahun kebelakang.

Untuk alat – alat penunjang pekerjaan seperti komputer dan printer, para pegawai masih menggunakan komputer yang relative masih baru masa pemakaian, namun untuk printer nya masih menggunakan printer lama, sehingga kadang – kadang printer tersebut macet dan menunda pekerjaan yang seharusnya.

Keberagaman komposisi pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan dampak yang mencolok bagi para pegawai, karena sudah ditanamkan sikap profesional di masing – masing diri pegawai. Sebagai contoh, masih ada staf di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bagian Pendapatan Asli Daerah yang hanya memiliki SK golongan 2, dikarenakan beliau hanya mengikuti pendidikan SMA, namun di lain pihak, ada juga pegawai yang baru lulus perguruan tinggi dan mampu memegang jabatan strukturan seperti kepala UPT kecamatan.

5.1.2 Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka

Sejak tahun 2000, ketika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memutuskan untuk melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan, maka sepenuhnya kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri telah menjadi milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, mulai dari penganggaran Kebutuhan operasional dinas dan aset – aset lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Untuk Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangka yang paling besar memberikan kontribusi adalah sektor pajak, dimana pajak daerah yang merupakan tumpuan utama Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu Pajak Daerah juga memberikan andil yang cukup besar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Bangka. Dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan dalam hal penerimaan pajak hotel dan restoran.

Dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama pelaksanaan magang, penulis mendapatkan peningkatan yang terjadi dari tahun 2010 hingga tahun 2013 hampir 100 % (seratus persen). Ini menunjukkan bahwa semakin lama semakin matang dan kokoh perencanaan Pemerintah

Kabupaten Bangka dalam memaksimalkan sumber daya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

5.1.3 Faktor-faktor yang selama ini menghambat peningkatan penerimaan pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka

Selama pelaksanaan magang di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bangka, penulis mendapatkan beberapa informasi dari para pegawai yang ada di bagian Pajak Daerah dimana penulis melaksanakan magang.

Salah satu informasi yang penulis dapatkan adalah hambatan – hambatan yang selama ini dialami oleh para petugas pemungut dalam melaksanakan pemungutan pajak. Diantaranya adalah :

1. Banyak wajib pajak yang belum terdaftar
2. Beberapa oknum wajib pajak yang membandel dikarenakan merasa memberikan kontribusi bagi nama baik pemerintah
3. Sumber daya aparatur yang kurang memahami tugas dan tanggung jawab nya

Banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar karena masih banyak masyarakat yang menjual makanan hanya pada waktu – waktu tertentu saja, misalnya pada pagi hari atau pada malam hari saja, selain itu juga

dipengaruhi oleh hari, sehingga mereka enggan membayar pajak karena menurut mereka keuntungan yang mereka dapatkan belum seberapa.

Faktor lainnya yaitu beberapa oknum wajib pajak merasa special karena ikut memberikan andil yang cukup besar bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Contohnya adalah ketika tamu provinsi maupun wisatawan interlokal datang mengunjungi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka tujuan utama mereka adalah wisata pantai, dan pantai yang paling lengkap sarana dan prasarana menurut mereka adalah di Parai Beach Resort. Dengan adanya tamu Provinsi ataupun pejabat yang datang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu hampir selalu menginap disana.

Dengan alasan kedatangan tamu istimewa tersebut, pihak manajemen mendapatkan dispensasi atas pajak terhadap tamu istimewa tersebut. Karena hal ini terus berlanjut tanpa adanya tindakan yang tegas dari pihak yang berwenang, maka membuat pihak manajemen membandel dan hampir selalu menunggak pembayaran pajak hotel dan restoran yang seharusnya dibayarkan tepat pada waktunya.

Selain wajib pajak, faktor lainnya berasal dari dalam tubuh organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri. Yaitu adanya kesalahpahaman antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bangka dengan Unit Pelaksana Tekhnis di kecamatan dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka setiap tahun telah memberikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak kepada masing – masing Unit Pelaksana Tekhnis di masing-masing kecamatan, dimana isinya adalah wajib pajak yang ada dimasing – masing kecamatan tersebut. Dengan maksud Unit Pelaksana Tekhnis tersebut dapat melaksanakan pemungutan pajak di daerah kecamatannya masing – masing sehingga pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dapat terlaksana lebih cepat dan terorganisir.

Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, terjadi kesalahpahaman antara petugas pemungut pajak yang ada di Unit Pelaksana Tekhnis di Kecamatan dengan Petugas Pemungut dari DPPKAD Kabupaten. Karena hal ini banyak wajib pajak yang belum dipungut hingga akhir tahun dan tutup buku, maka terjadi defisit penerimaan dari yang ditarget kan.

Untuk pajak restoran setiap tahun selalu melebihi target penerimaan yang dianggarkan oleh pemerintah, namun untuk pajak hotel setiap tahun selalu kurang dari target yang ditetapkan.

Penerimaan yang kurang dari target tentu saja berpengaruh pada penganggaran atas APBD yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya, maka pemerintah selalu melaksanakan segala macam cara dan upaya dalam memaksimalkan penerimaan Pajak pada umumnya, dan pajak hotel dan restoran pada umumnya.

5.1.4 Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka

Dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu :

1. Melakukan penyuluhan atau menjelaskan kepada wajib pajak yang sering terlambat membayar pajak hotel dan restoran.
2. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tetap membandel dalam membayar pajak.
3. Melakukan beberapa macam pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang pajak
4. Bekerja sama dengan pihak – pihak yang terkait dalam hal pemungutan pajak.

Setiap saat petugas melakukan pengumpulan atau penarikan pajak di hotel maupun di restoran karena masih menggunakan cara lama yaitu petugas yang memungut pajak di tempat, Petugas selalu memberikan informasi – informasi yang terkait dengan pajak hotel dan restoran yang diharapkan para wajib pajak dapat menyadari arti pentingnya membayar pajak bagi pertumbuhan ekonomi dan jalannya roda pemerintahan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya.

Para wajib pajak yang sering membandel dalam membayar pajak, dalam hal ini petugas datang ke rumah atau ke hotel dan restoran untuk memberikan peringatan lisan bahwa mereka telah terlambat, dari penuturan petugas pemungut pajak yang sering berbincang dengan penulis, cara ini ternyata lebih efektif dalam menjaga hubungan silaturahmi antara wajib pajak dengan pegawai petugas pemungut.

Bila peringatan lisan belum mampu menggerakkan hati wajib pajak dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis kepada wajib pajak yang masih membandel dalam membayar pajak. Selain peringatan secara tertulis, wajib pajak juga dapat terkena sanksi atau denda yang pembayarannya bersama – sama dengan pajak pokok yang harus dibayarkan.

Bila hal ini juga belum dapat membuat wajib pajak membayar pajaknya, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mencabut Izin atau usaha baik itu Hotel dan Restoran yang dimiliki, hingga wajib pajak membayar pajak yang semestinya.

Selain bagi wajib pajak, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak henti – hentinya memaksimalkan potensi dan kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, salah

satu hal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.

Pendidikan dan Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi yang di miliki oleh pegawai sehingga diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan ini, para pegawai memiliki kompetensi yang bagus dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel dan restoran khususnya selalu berkoordinasi dengan Dinas – Dinas yang terkait seperti Dinas Pariwisata, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kebersihan, dan dinas/ badan lainnya yang terkait,

Sehingga

5.1.5 Realisasi Pencapaian Target Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bangka

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka, terdapat perbedaan persentase realisasi dari Pajak hotel dan pajak restoran. Untuk pemungutan pajak restoran,selama beberapa tahun terakhir selalu melampaui target, namun tidak demikian dengan realisasi pajak hotel.Realisasi pajak hotel setiap

tahun selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah memenuhi target penerimaan.

Sedangkan pajak restoran selama 5 (lima) tahun terakhir selalu memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Yang perlu lebih diperhatikan adalah pajak hotel, apakah kesadaran wajib pajaknya yang dominan sedikit kurang ataupun petugas pelaksana yang melaksanakan tugas dengan sembarangan. Berikut penulis sampaikan tabel realisasi pendapatan pajak hotel dan restoran selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2008 hingga tahun 2013

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Kesimpulan

Pelaksanaan magang yang hanya 19 hari dirasakan oleh penulis sangat cepat, karena belum semua program kerja yang penulis susun terlaksana, namun itu sudah lebih dari cukup untuk mengamati proses kegiatan pengelolaan pajak hotel dan restoran di wilayah kabupaten Bangka.

Dari pelaksanaan magang yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan hal – hal berikut :

- 1) Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang paling berpotensi untuk masa yang akan datang
- 2) Pelaksanaan pemungutan pajak telah dilaksanakan dengan baik oleh setiap unsur yang terkait

- 3) Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sudah bagus, namun ada beberapa oknum yang masih membandel dalam melakukan pembayaran pajak, terutama oleh wajib pajak dari perusahaan besar
- 4) Masih banyak objek – objek pajak yang belum masuk dalam daftar wajib pajak yang bila dimasukkan akan menambah Pendapatan Asli Daerah
- 5) Sosialisasi mengenai pajak hotel dan restoran masih jarang dilakukan oleh petugas

5.2.2 Saran

Selama hampir sebulan penulis melaksanakan magang di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, ada beberapa hal yang penulis ingin sampaikan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah dan petugas yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangka umumnya.

Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu :

- 1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam membayar pajak dengan memberikan penghargaan atau apa pun bentuknya, tidak harus mahal, namun berkesan

- 2) Selain wajib pajak, petugas yang berprestasi juga harus mendapatkan penghargaan atas pelaksanaan tugasnya.
- 3) Administrasi yang tersusun dengan baik adalah kunci dari ketertiban pelaksanaan kegiatan
- 4) Banyak waktu luang yang tidak dimanfaatkan oleh pegawai. Sebaiknya waktu luang tersebut digunakan untuk melakukan penyuluhan kepada para wajib pajak mengenai pajak yang wajib mereka bayarkan